

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Kota Jakarta mempunyai sejarah yang sangat panjang. Pengertian tentangnya juga berkaitan dengan asal usul yang menjadi bentang luas geografisnya. Secara garis besar, Jakarta sebelum 1950 mempunyai berbagai tahapan dalam sejarahnya yaitu (Eddy, 1987: 7 -8):

- 
- a) Pembentukan pemukiman kota kuno zaman prasejarah.
 - b) Pemukiman terkoordinasi di bawah Kerajaan Tarumanegara
 - c) Kota perdagangan di bawah Tarumanegara kemudian Jayakarta
 - d) Kota pusat kekuasaan di bawah Belanda dan Jepang
 - e) Perebutan kekuasaan pasca kemerdekaan dan menjadi ibukota Indonesia kembali semenjak tahun 1950.

Demikian setelah Indonesia merdeka, untuk sementara sebelum ada penetapan resmi dari Pemerintah Pusat, Pimpinan atas pemerintahan daerah kota Jakarta dijalankan oleh Soewirjo sebagai pimpinan umum dan wakilnya ialah Bagindo Dahlan Abdoellah sedang Sekretaris Kotanya ialah Soeratno Sastroamidjojo. Baru kemudian pada tanggal 29 September 1945 Soeratno diangkat secara resmi sebagai Walikota Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia. Nama pemerintahan “*Jakarta Tokubetsu-Si*” diganti menjadi Pemerintahan Nasional Kota Jakarta (Hasan, 1955: 43).

17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi telah dikumandangkan, perangkat-perangkat negara telah disahkan pada sidang PPKI pertama sampai ketiga, dan segenap rakyat Indonesia mulai mengetahui bahwa bangsanya kini sudah merdeka lewat pemberitaan di koran-koran, coret-coretan di gedung dan gerbong kereta api. Namun, masih banyak tentara Jepang di Indonesia yang masih mempunyai kekuatan militer signifikan dibandingkan Indonesia.

Begitu Sekutu datang saat September 1945, Inggris yang menjadi pemimpin Sekutu awalnya berjanji dalam beberapa hal pada Republik. Memulangkan kembali prajurit Jepang serta tawanan perang Belanda yang ditahan Jepang ke negaranya, melucuti senjata milik Jepang, dan tidak ikut campur dalam kedaulatan Republik. Kaum Republik dan warganya pada awalnya menerima, sebagai sikap untuk tidak mencari musuh.

Kota-kota besar di Indonesia mengalami dampaknya, termasuk Jakarta. Para tahanan Belanda yang dibebaskan Sekutu kemudian melakukan kerusuhan dan teror di jalan-jalan raya Jakarta. Sekutu juga menduduki gedung-gedung penting yang meningkatkan kecurigaan rakyat Indonesia. Akibatnya, terjadi pertempuran yang terajut bersamaan dengan diplomasi untuk merebutkan kepentingan masing-masing pihak.

Tahun 1945 hingga 1950 merupakan serangkaian konflik antara Indonesia dan Belanda, sedang Inggris membantu kepentingan Belanda. Revolusi fisik adalah hal umum dilakukan oleh para pemuda, dimana BKR (Badan Keamanan Rakyat) bentukan pemerintah baru itu ikut serta di dalamnya. Meskipun begitu,

pemerintah Indonesia lebih mementingkan Jakarta sebagai kota diplomasi yang damai pada bulan November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang berisi perintah agar organisasi bersenjata Indonesia apapun untuk menyingkir dari ibukota.

Sebagai kota diplomasi, kota Jakarta kemudian terbagi antara Republik dan Sekutu yang memanfaatkan Jepang sampai kepulangannya. Di bagian pinggiran Jakarta yang merupakan sawah sekelilingnya, merupakan markas para laskar yang menentang Belanda (Blackburn, 2012: 209). Belanda menguasai jalur perdagangan impor dari pelabuhan hingga Menteng dan Kantor Urusan Pemerintahan. Pasukan Inggris baru keluar dari Indonesia pada akhir tahun 1945. Sedangkan Sekutu berhasil memulangkan pasukan Jepang yang bersedia ke negaranya kembali pada akhir September 1946 (Willard, 1988: 232). Belanda tetap tinggal untuk mengambil wilayah jajahannya dahulu.

Perlahan, Belanda dapat kembali menduduki instalasi dan gedung-gedung penting yang sebelumnya dikuasai orang Indonesia. Sementara kaum Republik menguasai wilayah-wilayah sawah yang menyediakan makanan bagi penduduk dalam kota. Namun seiring berbagai perjanjian yang ada membuat kaum Republik terdesak keluar dari Jakarta pada 1946 dan memindahkan ibukota ke Yogyakarta. Wilayah Republik Indonesia di Jakarta kemudian direbut seluruhnya oleh Belanda pada 1947, dan para pemimpin Indonesia ditangkap oleh Belanda. Keadaan secara umum tidak banyak berubah sampai pada pengakuan kedaulatan Belanda pada 1949 dan Jakarta merapikan tatanan dari buatan Belanda pada 1950.

Tema yang dibahas skripsi ini berbeda dengan buku Robert Bridson Cribb yang berjudul “Gejolak Revolusi Jakarta 1945 - 1949” yang membahas tentang hegemoni yang dimiliki antara Indonesia semasa kemerdekaan yang tidak dituliskan semuanya tunduk pada pemerintah sehingga terjadinya anarki. Diperparah dengan kedatangan Sekutu pada September 1945, membuat pemerintahan Indonesia terdesak dan menyingkir ke Yogyakarta pada Januari 1946. Menyisakan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta yang bertahan di Balai Agung yang menjadi eksistensi pemerintahan Jakarta sampai pada 1947. Buku ini juga membahas LRDR yang bersebrangan dengan pihak Belanda maupun Indonesia yang dianggap meninggalkan kota Jakarta untuk diserahkan kepada Sekutu.

Skripsi ini tentang pengertian revolusi fisik dan juga bagaimana revolusi fisik itu terjadi di Jakarta. Berbeda dengan buku “Gejolak Revolusi Jakarta” yang juga membahas daerah sekitar Jakarta seperti Subang, Cikampek, Tangerang, Bekasi, dan sebagainya, skripsi ini tidak membahasnya dengan detail. Cribb juga memulai pembahasannya dengan latar belakang Jakarta semasa diduduki VOC. Skripsi ini tidak mendalami peran ‘dunia gelap’ seperti preman-preman terhadap kemerdekaan Indonesia maupun membahas lebih lanjut layaknya buku tersebut.

Pembahasan dalam skripsi ini ditekankan pada Pembatasan dan Perumusan Masalah yang akan ditekankan sebagai berikut:

B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah

Penjelasan tentang batas wilayah Jakarta ini mempunyai banyak pengertian. Stad *Batavia* dan *Ommelanden* (daerah luar tembok) yang berdiri semenjak berdirinya

pada 1602 diperbaharui susunannya pada 1905 yang dimasukkan dalam *Residentie* (karesidenan) *Batavia* (Warmansyah, 1997: 2). *Residentie Batavia* yang berpusat di Purwakarta tersebut terdiri dari tiga *regentschaaap* (kabupaten) yaitu *Regentschaap Batavia*, *Regentschaap Meester Cornelis*, dan *Regentschaap Buitenzorg*. *Regentschaap Buitenzorg* memekarkan diri menjadi *Residentie* (karesidenan) *Buitenzorg* yang terdiri atas *Regentschaap* Bogor, Cianjur, dan Sukabumi (Chaer, 2015: 54 – 56).

Setelah 1925, *Residentie* (karesidenan) *Batavia* meliputi tiga wilayah dengan dua kabupaten (*regentschaap*) yaitu *Regentschaap Batavia* dan *Regentschaap Meester Cornelis* dan satu kotapraja (*gemeente*, atau haminte menurut ejaan lokal) yaitu *Gemeente Batavia*. *Gemeente Batavia* kemudian diganti namanya menjadi *Stadsgemeente Batavia* pada 1926.

Di bawah *Regentschaap* (kabupaten) *Batavia*, terdapat enam distrik (kawedanaan) yaitu (Chaer, 2015: 54 – 56):

- Distrik Batavia
- Distrik Weltevreden (Gambir)
- Distrik Tangerang
- Distrik Meester Cornelis
- Distrik Kebayoran
- Distrik Bekasi



Pembagian itu dilanjutkan oleh *Onderdistrik*, *Onderdistrik* membawahi *Wijk* dan *Wijk* membawahi *Kampung*. Hal tersebut berlanjut sampai pada masa Jepang pada 1942. Pada masa ini, terjadi berbagai istilah yang dimana *Residentie* (karesidenan) *Residentie* berubah menjadi *Syuu*, yang membawahi *Si* (menggantikan *stadsgemeente*) dan *Ken* (menggantikan *regentschaap*). *Jakarta Tokubetsu-Si* kemudian membawahi *siku* (setingkat kawedanan/*distrik*) yang terdiri atas Penjaringan *Siku*, Mangga Besar *Siku*, Tanjung Priok *Siku*, Tanah Abang *Siku*, Pasar Senen *Siku*, Gambir *Siku* dan Jatinegara *Siku* (Warmansyah, 1997: 5). Kedudukan provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dihapuskan.

Ketika Indonesia merdeka, pemerintahan daerah *Jakarta Tokubetsu-Si* berubah nama menjadi Pemerintahan Nasional Kota Jakarta, yang membagi wilayah Pamongpraja dan Kepolisian menjadi tujuh wilayah, yaitu Penjaringan, Mangga Besar, Tanjung Priuk, Tanah Abang, Gambir, Pasar Senen, dan Jatinegara (Hasan, 1952: 76).

Dan tentang Pamongpraja pada umumnya masih tetap susunan dan organisasi sebelumnya. Dan hingga penghabisan tahun 1946, daerah ke Pamongprajaan terbagi atas 7 Kawedanan, 34 Kelurahan Indonesia, 10 Kelurahan Tionghoa, 1 Kelurahan Arab dan 1 Kelurahan India. Sedangkan untuk keluarga asing, Pemerintahan Kota dibantu oleh seorang Letnan Tionghoa, seorang Kapten Arab, dan seorang penasehat bangsa India (Hasan, 1952: 77)..

Kemudian terjadi pemerintahan rangkap yang lebih didominasi Sekutu dibanding Jakarta. Pada tanggal 31 Oktober 1945, dikeluarkan suatu maklumat

oleh Mayjen D. C. Hawthorn sebagai panglima tentara Sekutu di Jawa, Madura, dan Bali-Lombok yang diantaranya menyatakan nama Jakarta sebagai *Municipal of Jakarta*. Penjelasan bahwa sejak tanggal tersebut, kota Jakarta berada di bawah pemilikan Pemerintahan Militer Sekutu (AMA/*Allied Military Administration*) berikut dengan batas-batasnya (Hasan, 1952: 77):

- Di sebelah Barat dengan Banjir Kanal
- Selatan dengan Banjir Kanal sampai Kereta Api dari Barat ke Timur juga termasuk bagian Jatinegara sebelah Selatan,
- Timur - Kali Buaran dan Kali Cakung terus ke Utara,
- Utara dengan Tanjung Priok dan Kampung Koja.

Hal tersebut mempersulit Pemerintahan Nasional Kota Jakarta, dan mereka mengumumkan pada saat itu masih beroperasi di Jakarta. Semenjak Sekutu Inggris pamit dari Indonesia semenjak November 1946, maka pemerintahan AMACAB digantikan oleh Belanda. Maka dari itu, diadakan perundingan pada Desember 1946, yang merugikan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta. Belanda yang kemudian berniat mengembalikan status *Staadsgemeente Batavia* en *Ommelanden* berhasil melakukannya pada 21 Juli 1947 (Warmansyah, 1997: 9). Sementara, *Regentschaap Batavia* dan Meester Cornelis dihapuskan.

Pada ketetapan *Stadsblad* tahun 1948, *Staadsgemeente Batavia* ditambah wilayahnya dengan distrik-distrik dari Residentie (karesidenan) *Batavia* yang terdiri atas (Warmansyah: 1997, 10-11):

I. Distrik Matraman, ini dibagi dalam onderdistrik-onderdistrik yang berikut:

- a. Onderdistrik Senen.
- b. Onderdistrik Salemba.
- c. Onderdistrik Matraman.
- d. Onderdistrik Kampung Melayu.

2. Distrik Gambir, dibagi dalam :

- a. Onderdistrik Gambir.
- b. Onderdistrik Tanah Abang,
- c. Onderdistrik Petamburan

3. Distrik Penjaringan, dibagi dalam :

- a. Onderdistrik Mangga Dua.
- b.- Onderdistrik Sawah Besar.
- c. Onderdistrik Penjaringan.
- d. Onderdistrik Krukut

4. Distrik Tanjung Priok, dibagi dalam :

- a. Onderdistrik Tanjung Priok
- b. Onderdistrik Kemayoran



Residentie Ommelanden van Batavia dibagi secara administratif dalam :

I. Distrik Tangerang Ilir. ini juga dibagi dalam :

- a. Onderdistrik Cengkareng.
- b. Onderdistrik Batu Ceper.
- c. Onderdistrik Teluknaga

2. Distrik Tangerang Udik. dibagi dalam :

- a. Onderdistrik Tangerang
- b. Onderdistrik Cipondok
- c. Onderdistrik Serpong.

3. Distrik Kebayoran. dibagi dalam :

- a. Onderdistrik Kebayoran I lir.
- b. Onderdistrik Kebayoran Udik
- c. Onderdistrik Ciledug.

d. Onderdistrik Ciputat

4. Distrik Depok. dibagi dalam :

- a. Onderdistrik Depok.
- b. Onderdistrik Parung.



c. Onderdistrik Gunung Sindur.

d. Onderdistrik Sawangam

5. Distrik Bekasi, ini dibagi dalam :

a. Onderdistrik Bekasi

b. Onderdistrik Babelan.

c. Onderdistrik Cilincing.

d. Onderdistrik Pulo Gadung.

6. Distrik Kramatjati, dibagi dalam :

a. Onderdistrik Pasarminggu.

b. Onderdistrik Mampang Prapatan.

c. Onderdistrik Pasar Rebo.

d. Onderdistrik Pondok Gedeh

7. Distrik Cibinong, distrik ini meliputi :

a. Onderdistrik Cibinong.

b. Onderdistrik Citeureup

c. Onderdistrik Cimanggis.



Setelah pengakuan kedaulatan, Belanda mengembalikan Jakarta kepada Indonesia. *Gewest Batavia en Ommelanden* dihapuskan dengan Ketetapan Residen RIS tahun 1950 yang menetapkan kota Jakarta sebagai berikut (Warmansyah: 12-13):

1 . Kotapraja Jakarta.

2. Teluk Jakarta

3. Wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kota Jakarta yaitu :

- a. Sebagian dari Distrik Tangerang Ilir. yaitu Onderdistrik Cengkareng.
- b. Sebagian dari Distrik Kebayoran. yaitu wilayah yang meliputi Onderdistrik Kebon Jeruk, Kebayoran Ilir dan Kebayoran Udik.
- c. Sebagian dari Distrik Kramatjati. yaitu Onderdistrik Mampang Prapatan, Pasar Rebo.
- d. Sebagian dari Distrik Bekasi. yaitu wilayah yang meliputi Onderdistrik Pulo Gadung dan sebagian dari Onderdistrik Cilincing, (desa Cilincing. desa Semper).

Pada 31 Maret 1950, diubah nama kembali menjadi Kotapraja Jakarta Raya yang menggantikan susunan pemerintahan Belanda sebelumnya. Daerah ini yang akan menjadi cakupan penelitian. Daerah seperti bagian dari Distrik Bekasi yang lain seperti Onderdistrik Bekasi, Babelan, Distrik Tangerang Ilir, Distrik Tangerang Udik, Distrik Depok, Distrik Cibinong juga dibahas karena saling keterkaitan dengan tema skripsi namun bukan pembahasan utama dari skripsi ini.



Gambar 1: Peta Jakarta 1950¹

Sedangkan batasan temporal yang ditetapkan oleh peneliti adalah pada masa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 sampai Maret 1950 dimana Jakarta dikembalikan lagi sebagai ibukota serta pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda.

Ada dua permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, yaitu:

1). Bagaimana sikap orang Indonesia menghadapi Sekutu dalam revolusi fisik yang terjadi pada 1945 – 1950?

2). Mengapa revolusi fisik di Jakarta pada 1945 – 1950 terjadi?

¹ Sumber : Ismael Hasan, Kotapradja Djakarta Raja

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Teoretis:

Memberikan sumbangan bagi pemikiran bagi penelitian sejarah tentang "Kota Jakarta pada Masa Revolusi Fisik 1945 - 1950". Juga memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu sejarah dan ilmu bantu lainnya.

Praktis:

a) Bagi penulis

Sebagai persyaratan lulus untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Menambah wawasan peneliti yang berkaitan dengan "Kota Jakarta pada Masa Revolusi Fisik 1945 - 1950".

b) Bagi pembaca

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pikiran serta dapat menjadi referensi dalam penelitian-penelitian yang berkaitan tentang " Kota Jakarta pada Masa Revolusi Fisik 1945 - 1950".

D. Kerangka Analisis

Revolusi menurut Dadang Supardan, adalah menunjuk pada suatu pengertian tentang perubahan sosial politik yang radikal, berlangsung cepat, dan besar-besaran. Hal itu berbeda dengan konsep evolusi yang berarti perubahan yang berlangsung secara perlahan namun pasti (Supardan, 2013: 342).

Arendt menjelaskan bahwa pengalaman revolusioner adalah sebuah restorasi, dimana pemberontak mencoba untuk meletakkan kemerdekaan dan hak istimewa, yang dimana mereka tidak dapatkan karena pemerintahan yang berbentuk despotisme. Malah de Tocqueville mengemukakan bahwa revolusi adalah untuk

menjatuhkan orang elit yang terjadi pada masa perubahan drastis sosial, budaya, dan politik (Coccia, 2019: 4).

Pada 1960-an, ilmuwan-ilmuwan sosial di Princeton University telah mengganti kata "revolusi" dengan "perang internal" yang dilihat sebagai uapa untuk mengubah kebijakan negara, pemimpin, atau lembaga dengan menggunakan kekerasan diantara masyarakat, dimana persaingan kekerasan bukanlah norma dan dimana corak lembaga yang tersusun rapi hadir.

Menurut Tiruneh, berbagai penyebab revolusi yang terjadi adalah perkembangan ekonomi, tipe rezim, dan kebobrokan (ineffectiveness) negara. Faktor luar dan ekonomi dalam negeri mampu mencetuskan revolusi yang mendadak. Untuk revolusi yang terencana, ada peran ideologi yang mendorongnya revolusi satu dan yang lainnya. Keberhasilan revolusi baik sosial dan politik tidak dapat dijelaskan dengan beberapa variabel saja. Tambahan, variabel yang sudah dituliskan tersebut sudah barang tentu dipengaruhi oleh keberhasilan peran militer (Tiruneh, 2014).

Rosenau menjelaskan kategori perang internal (Coccia, 2019: 4):

- Perang Personal ; tujuan perang ini adalah untuk mengambil alih peran dalam otoritas politik.
- Perang Otoritas: pemberontak bersaing untuk mengambil peran dalam struktur politik dan susunannya. Perang otoritas ini berusaha untuk mengganti sistem kediktatoran dengan demokrasi.
- Perang Struktural : Tujuan pemberontak adalah untuk memperkenalkan perubahan sosial dan ekonomi (perang struktural mengandung elemen perang personel dan otoritas)

Dalam pemahaman Rosenau, perang personel merupakan derajat yang lebih rendah jika dipandang perubahan sosialnya. Perang otoritas berada di tengah, dan perang struktural ini yang paling tinggi derajatnya.

Menurut Legge, revolusi memang mempunyai makna sentral bagi persepsi bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, peristiwa-peristiwa Yang terjadi pada periode 1945-1949 merupakan revolusi yang dipandang sebagai manifestasi tertinggi dari tekad nasional, lambang kemandirian suatu bangsa, dan bagi mereka yang terlibat di dalamnya maka revolusi adalah pengalaman emosional luar biasa dengan rakyat yang berpartisipasi langsung (Aman, 2015: 10).

Istilah “revolusi fisik” diperkenalkan oleh Soekarno dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 17 Agustus 1959 di Jakarta, dimana pembahasan revolusi menurutnya dibagi tiga, yang dimana pembagian pertama dari 1945 – 1950 adalah revolusi fisik, lalu 1950 – 1955 adalah survival, dan 1956 adalah revolusi sosial ekonomis (Sukarno: 1965, 227-228):

“1945-1950. Tingkatan Physical Revolution. Dalam tingkatan ini kita merebut dan mempertahankan apa yang kita rebut itu, yaitu kekuasaan, dari tangannya pihak imperialis, ke dalam tangan kita sendiri. Kita merebut dan mempertahankan kekuasaan itu dengan segenap tenaga rokhaniah dan jasmaniah yang ada pada kita, – dengan apinya kitapunya jiwa dan dengan apinya kitapunya bedil dan meriam. Angkasa Indonesia pada waktu itu adalah laksana angkasa kobong, bumi Indonesia laksana bumi tersiram api. Oleh karena itu maka periode 1945-1950 adalah periode Revolusi phisik. Periode ini, periode merebut dan mempertahankan kekuasaan, adalah periode Revolusi politik. ...”

Warmansyah dalam bukunya “Sejarah Revolusi Fisik Daerah DKI Jakarta” terbitan 1997 mengartikan revolusi fisik sebagai revolusi kemerdekaan sebagai berikut (Warmansyah, 1997: 14):

“Revolusi kemerdekaan (fisik) merupakan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang pada hakekatnya di tiap-tiap daerah di seluruh Indonesia terlibat dalam Revolusi Kemerdekaan tersebut,”

Revolusi fisik yang terjadi di Jakarta merupakan bagian dalam Revolusi Indonesia yang terjadi pada 1945 – 1950. Revolusi ini tidak hanya bersifat merebut peran dari orang yang berkuasa sebelumnya, namun juga melakukan perubahan ekonomi dan sosial. Secara politik, Belanda yang mencoba menguasai kembali Indonesia yang baru merdeka, dilawan dengan cara pertempuran maupun diplomasi sembari menarik dukungan internasional.

Ekonomi yang dimaksud disini adalah mengganti system imperialisme yang terjadi pada masa Belanda dan Jepang, dimana segala sumber daya alam dan manusia dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh kepentingan penjajah tanpa mempedulikan bangsa yang terjajah yaitu Indonesia. Secara sosial, revolusi fisik di Jakarta ini menjadi penentu identitas bagi warga Jakarta itu sendiri. Bahwa mereka bukanlah bagian dari penjajahan itu sendiri, namun sebagai warga Indonesia yang merdeka.

Maka dari itu di Jakarta terdapat tiga fase yang dilaluinya selama revolusi, yaitu kota revolusi yaitu semenjak terjadinya proklamasi kemerdekaan sampai pada penetapan pengosongan kota Jakarta pada 19 November 1945, kota diplomasi dari 19 November sampai bubarnya Pemerintahan Nasional Kota Djakarta oleh

Belanda pada 21 Juli 1947, dan Pemerintahan Batavia dibawah pemerintahan Belanda kembali yang dimulai pada 1947 sampai Pengakuan Kekuasaan Indonesia oleh Belanda pada 1949. Jakarta dijadikan ibukota Indonesia kembali pada tahun 1950 oleh pemerintah Republik Indonesia.

E. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, metode menurut Husin Sayuti merupakan faktor penting dalam memecahkan suatu masalah yang turut menentukan keberhasilan suatu penelitian. Menurut Kuntowijoyo, tahapan penulisan sejarah ditentukan dengan urutan cara berikut (Kuntowijoyo, 2005: 69):

1) Heuristik

Pengumpulan sumber dilakukan sesuai dengan tema dan judul yang ditulis peneliti. Sumber itu terbagi atas dua, yaitu sumber tertulis dan sumber yang tidak tertulis. Sumber primer menjadi bagian sangat penting, namun karena kelangkaannya sumber sekunder dapat amat menentukan. Sumber tertulis didapatkan berupa surat-surat, notulen, dan sebagainya. Artefak adalah bentuk berupa peninggalan benda seperti foto, bangunan, alat-alat, dan sebagainya. Sumber lisan didapatkan setelah mendapat cukup banyak pengetahuan dari apa yang diteliti. Sumber kuantitatif berupa statistik yang dapat menjelaskan suatu keadaan di tempat tertentu.

2) Kritik Sumber

Kritik sumber atau verifikasi adalah memeriksa keaslian sumber. Yang terdapat dua cara, yaitu dengan melihat autentisitasnya dan kredibilitasnya. Autentisitas berarti dicocokkan antara sumber dengan kesesuaian yang terdapat dalam internal seperti gaya tulis maupun eksternalnya seperti tinta, kertas, dan kondisinya. Kredibilitasnya yang berarti membandingkan sumber dengan kewajaran sesuai pada masa itu, misalnya pencocokkan antara tradisi yang dilakukan dengan dokumen itu dituliskan, dan sebagainya.

3) Intepretasi

Intepretasi adalah penafsiran berdasarkan sumber data dan keterangan yang telah diperoleh untuk proses analisis dan sintesis. Analisis di sini adalah menguraikan sumber yang terdiri dari beberapa kemungkinan. Setelah diuraikan segala kemungkinan yang ada, maka ditemukan sebuah fakta yang menggambarkan satu hal yang demikian. Sedangkan sintesis adalah mengelompokkan dari fakta-fakta sehingga terbentuk satu konsep. Jikapun dikemudian perbedaan tafsir dari satu fakta adalah hal yang sah namun harus didasarkan pada fakta yang ada.

4) Historiografi

Berbagai pernyataan mengenai masa silam yang telah disintesiskan selanjutnya ditulis dalam bentuk kisah sejarah atau historiografi. Penyajian penelitian dalam bentuk tulisan ini dibagi tiga, yaitu pengantar, hasil penelitian, dan penutup. Pengantar berisi permasalahan, latar belakang, historiografi, pernyataan-pernyataan, konsep yang dipakai, sumber, dan jawaban atas pertanyaan yang disajikan.

Maka dari itu penulis menggunakan penulisan deskriptif analitis, yang berarti penulisan sejarah yang melihat rangkaian-rangkaian peristiwa yang terjadi ditelaah secara rinci bagaimana penyebabnya dan dampaknya dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial yang terjadi. Deskriptif analisis, cenderung membuat generalisasi terhadap peristiwa sejarah yang terjadi dengan menggunakan konsep-konsep ilmu sosial selain sejarah (Kuntowijoyo, 2013 : 80-81).

2. Bahan Sumber

Peneliti akan menggunakan sumber baik dari sumber primer maupun sekunder. Sumber primer adalah catatan yang berkaitan langsung dengan peristiwa ataupun pelaku sejarah. Peneliti akan menggunakan rekaman dan beberapa dokumen lainnya dari pelaku sejarah terkait peristiwa “Revolusi Fisik di Jakarta Tahun 1945 - 1950” di Arsip Nasional Republik Indonesia.

Untuk sumber sekunder adalah berupa catatan yang tidak berkaitan langsung dengan peristiwa ataupun pelaku sejarah. Peneliti menggunakan buku dan jurnal yang ada di internet maupun yang ada di UPT Perpustakaan UNJ, UPT Perpustakaan UI, dan Perpustakaan Nasional Indonesia juga internet. Sumber yang didapatkan oleh peneliti adalah buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.